

Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

¹Aguswan,²Abdul Mirad,³Wasiah Sufi,⁴Dwi Herlinda,⁵Elly Nielwaty
^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

Korespondensi :aguswan@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang Model Pengembangan wilayah kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penelitian lanjutannya adalah Perwujudan Good governance pada pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya sebagai kecamatan yang baru dimekarkan tahun 2020, Pemekaran kecamatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan public. Prinsip dasar yang diterapkan dalam menuju kepemerintahan baik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan informan (Pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagai tiga domain yang memberikan dukungan pelaksanaan good governance. Hasil penelitian yang dicapai yaitu perwujudan fungsi Governance pada state (negara atau Pemerintah), Private sektor (dunia usaha) dan society (masyarakat) serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Governance, Pekanbaru, Pengembangan

Abstract

This research is a continuation of previous research on the Regional Development Model for the Binawidya District, Pekanbaru City. The follow-up research is the realization of good governance after the division of the Binawidya District as a newly expanded sub-district in 2020, the division of the sub-district is very important to improve public services. The basic principles applied to good governance are participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus-oriented, fairness, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. The research approach used is a qualitative descriptive approach through observation, documentation and in-depth interviews with informants (government, private and community) as three domains that provide support for the implementation of good governance. The research results achieved are the realization of the governance function in the state (state or government), private sector (business world) and society (community) as well as problems that become obstacles in the administration of government, development and community empowerment.

Keyword: Governance, Pekanbaru; Development

1. PENDAHULUAN

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance yaitu Pemerintah, sector swasta dan masyarakat. Dalam hal ini kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka good governance, bila diciptakan suatu sistem administrasi public yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan public yang relevan bagi masyarakat.

Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance)

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (sudarmasyanti, 2003:6)

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki 15 (lima belas) kecamatan dan salah satunya kecamatan Binawidya yang dikategorikan sebagai kecamatan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru N0.02 tahun 2020. Dalam mewujudkan good governance dan pelayanan publik, Pemerintah Kecamatan dituntut untuk memberikan Pelayanan yang professional dengan mengedepankan hak-hak public guna mendapatkan layanan prima (berkualitas). Pelayanan prima dapat diwujudkan, bila tersedianya sumber daya organisasi meliputi Sumber daya manusia, alat-alat dan sarana prasarana pendukung yang bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat ketika hendak mendapatkan layanan yang disediakan.

Dalam rangka mewujudkan good governance, Pemerintah Kecamatan Binawidya melakukan inovasi – inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan public. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melakukan penataan dan perbaikan tata kelola pelayanan public baik secara layanan maupun tidak langsung. Pelayanan secara langsung dilakukan dengan tatap muka antara masyarakat dengan petugas layanan, tentunya dalam hal ini diberikan ruang dan tempat yang memadai dan membuat warga atau pengunjung nyaman berurusan di kantor kecamatan binawidya. Dilihat dari tata fisik sarana dan prasana kantor kecamatan telah memadai, namun keandalan dan kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat masih belum professional. Hal ini dibuktikan masih ada anggapan masyarakat yang mengeluh dengan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas di amati bahwa kemampuan pegawai kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat masih rendah, padahal kecamatan binawidya telah memiliki Slogan “ MANTAP (mandiri, tangguh, professional) dan slogan ini harus diterapkan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan informasi dilapangan diketahui penerapan “MANTAP” hanya sebagai slogan dan pada kenyataannya, masih ada pegawai kurang mampu dalam penerapan penerapan slogan yang ditetapkan.

Camat sebagai kepala Pemerintahan di wilayahnya tentunya memiliki peran dan tanggung jawab, baik dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. keseluruhan fungsi-fungsi pemerintahan kecamatan, camat harus mampu

mengawasi dan pengendalian segala program dan kegiatan pembangunan diwilayah kerjanya. Selain membina organisasi kecamatan, camat juga dituntut untuk menjalin kemitraan, baik dengan pihak swasta maupun masyarakat.

Dalam hal ini peran swasta (dunia usaha) belum menunjukkan tanggung jawab sosialnya, terutama dalam merealisasikan program Corporate service responsibility (CRS), akibat kurang terjalinya kemitraan antara Pemerintah kecamatan dengan pelaku usaha. Begitu juga dengan program pemberdayaan kepada masyarakat, dimana organisasi kelompok masyarakat dalam bentuk UMKM/ koperasi/ komunitas dan organisasi sosial kurang memainkan perannya, selanjutnya masih banyak para pelaku UMKM belum mendapatkan pembinaan. Oleh karena institusi governance perlu diterapkan pada penguatan fungsi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Penelitian di laksanakan dikecamatan binawidya, sebagai kecamatan yang baru dimekarkan dari kecamatan sebelumnya yaitu kecamatan tampan. Informant penelitian melibatkan camat dan lurah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang secara langsung sebagai tiga domain perwujudan governance. Teknik pengumpulan data menyandarkan pada wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data yang sesuai dengan data yang ditemui dilapangan dan di analisa secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah No.02 tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi dasar hukum Pemekaran atau pembentukan kecamatan Binawidya dengan membawahi 5(lima) kelurahan yaitu (1) kelurahan Simpang baru, (2) kelurahan Binawidya, (3)kelurahan Delima,(4) kelurahan Tobekgodang dan (5) kelurahan sungai sibam. Pemerintah kecamatan dan kelurahan merupakan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) memerlukan keterlibatan antar berbagai pelaku yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Istilah Pemerintah (*goverment*) berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian,kota dan sebagainya, atau bisa juga berarti “lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara negara bagian, atau kota dan sebagainya. Sedangkan istilah kepemerintahan (*governance*) berarti “ tindakan, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan, atau juga bisa diartikan: suatu kegiatan (proses). sebgaimana dikemukakan Kooiman (delly mustafa,2013) governance serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan interaksi pemerintah atas kepentingan tersebut.

Istilah *governance* tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengeloaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga di artikan pemerintahan. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman prinsi-prinsip didalamnya dan menjadi tola ukur kinerja pemerintahan. Prinsip-prinsip

tersebut yaitu : partisipsi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Perwujudan *good governance* (GG) terletak pada institusi governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinterkasi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Perwujudan Good governance pada tiga domain di atas dapat di deskripsikan pada fungsi-fungsi pemerintah, fungsi pelaku usaha dan fungsi kelompok dan masyarakat.

1. Perwujudan good governance pada organisasi publik (Pemerintah)

Pemerintah kecamatan di pimpin oleh seorang Camat sebagai kepala wilayah kecamatan dan membawahi kelurahan sampai level paling bawah tingkat Rukun warga /Rukun tetangga. Peran Pemerintah kecamatan harus mampu menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sebagai perpanjangan tangan dari wali kota, Camat dan lurah harus mampu menindak lanjuti berbagai peraturan atau keputusan wali kota untuk di implementasikan ke tengah-tengah masyarakat. Kebijakan atau keputusan harus dapat dipahami dan disosialisakan kepada publik (warga), sehingga warga memahami maksud dan tujuan dari sebuah keputusan yang ditetapkan pemerintah Kota.

Pada pelaksanaannya kebijakan/keputusan merupakan produk hukum yang mengatur kehidupan bersama ditetapkan untuk mengakomodir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sala satu yang dapat dijadikan kasus pada Pemerintahan Kecamatan Binawidya tentang perubahan nama kecamatan dari kecamatan sebelumnya kepada kecamatan dimekarkan tentunya akan berpengaruh kepada identitas kependudukan maupun kepemilikan barang/ lahan bangunan milik swasta dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban dan mengimbau kepada masyarakat diwilayahnya untuk melakukan perubahan nama/identitas warga, baik pada Kartu keluarga (KK) maupun pada kartu tanda penduduk (KTP). perubahan identitas warga perlu disesuaikan dengan nama kecamatan yang baru dimekarkan. Kasus yang terjadi dikecamatan binawidya , dimana masih banyak warga yang belum merubah status wilayah administratif kependudukan sesuai dengan nama wilayah admiisratif kecamatan yang sudah dimekarkan sejak tahun 2020. Untuk itu pemerintah kecamatan bersama lurah perlu membuat langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mempermudah pelayanan identitas kependudukan yang dapat membantu warga dalam penyelenggaraan administratif pemerintahan, terutama dalam perubahan status identitas Kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan lahan tanah bangunan milik masyarakat.

Persoalan lainnya dalam mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan (K3) dikecamatan binawidya, terutama dalam pengelolaan sampah baik secara swakelola dan mandiri masih belum tertib terlaksana. pengelolaan sampah secara swakelola menjadi tanggung jawab pihak ketiga (pemenang tender) yang telah ditetapkan wali kota pekanbaru, sedangkan pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan oleh pihak Rukun warga (RW) secara swadaya masyarakat diwilayah kelurahan masing-masing. Pada kenyataannya ,bahwa pengelolaan sampah masih belum tertib disebabkan sumber daya yang dibutuhkan masih sangat terbatas, sehingga banyak tumpukan sampah yang berserakan baik di jalan protokol maupun di lingkungan perumahan warga. Sampah yang masuk kedalam selokan dan bila terjadi hujan secara terus menerus berdampak banjir di lingkungan masyarakat. Berikut di gambarkan potrex kondisi serakan sampah yang belum terkelola dengan baik oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru:

Gambar 1. Kondisi serakan dan tumpukan sampah dan genangan air dikecamatan Binawidya.



Sumber : hasil penelitian lapangan, 2022

Fungsi pemerintah untuk mewujudkan *governance* dapat ditinjau sejauh mana program pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya pasca pemekaran kecamatan binawidya , seyognya camat beserta lurah bersama pelaku kepentingan diwilayahnya harus mampu memperbaiki tatakelola pemerintahan yang baik dalam memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan tujuan dimekarnya kecamatan binawidya yaitu terpenuhi penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Perwujudan good governance pada private sektor

Governance tidak hanya dilakukan oleh organisasi publik tetapi juga dilaksanakan oleh dunia usaha (swasta). Dunia usaha berperan penting dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan secara nyata. Pentingnya kehadiran swasta bagi pemerintah yaitu dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tentunya di perkuat dengan peran perusahaan swasta dalam mendukung program *Costumer service responsibility* (CSR).

CSR merupakan sala bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. UU No.40 tahun 2007 menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam memiliki kewajiban menyisikan dari sebgian keuntungannya untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat disekitarnya. CSR hendaknya dilakukan dalam bentuk pemberdayaan, CSR harus di arahkan untuk menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk dikembangkan. Potensi tersebut bisa dari sumber daya manusia potensi sumber daya alam, potensi budaya dan juga potensi sosial kemasyarakatan. Potensi tersebut selanjutnya dibina melalui berbagai kegiatan yang berkesinambungan, sehingga pada akhirnya kualitas linkungan dan kehidupan masyarakat bisa meningkat, menigkatkan kemandirian, dan pada akhirnya kesejahteraannya juga meningkat.

Sasaran utama CSR diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia. Mengubah prilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Membangun sarana fisik dalam masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan membangun sumberdaya manusia. Misalnya ketika membangun gedung koperasi, perlu dimulai dari membangun kesadaran perlunya koperasi, manajemen koperasi, berbagai usaha dalam koperasi, dan kemampuan lainnya. Dengan cara seperti itu maka pembangun sarana fisik sebagai alat untuk mengubah prilaku masyarakat untuk hidup berkoperasi, bekerja sama, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas *governance* pada *private sektor* dapat diwujudkan dengan memperkuat kehadiran perusahaan untuk membantu masyarakat disekitarnya. Sehubungan dengan itu Pemerintah bersama perusahaan perlu berkolaborasi mesujudkan *governance* dengan bekerja sama dalam membantu

kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, bahwa pemerintah Binawidya belum melakukan kalaborasi (kerjasama) dengan perusahaan -perusahaan dalam memamfaatkan program CSR yang dimiliki perusahaan, sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terbentuk ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu camat dan lurah perlu melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang ada diwilayahnya guna menjalin kemitraan dalam memamfaatkan secara bersama-sama pemamfaatan program CSR ditengah-tengah masyarakat. Dari data yang dipeoleh bahwa pemerintah kecamatan Binawidya belum bersinergis menjalin kerja sama dengan swasta. Dan sampai saat ini Pemerintah hanya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dari peran pihak ke tiga (kontraktor) yaitu melalui pelelangan atau tender yang di tetapkan oleh dinas lingkungan hidup dan dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan/kelurahan dan pelaksanaan pengelolaan sampah belum tuntas dan masih menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

3. Perwujudan good governance pada society (masyarakat)

Isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Sejalan dengan semangat keterbukaan dan penerapan otoomi telah menempatkan kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai atakeholders pembangunan. Kondisi ini telah berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluang bagi aktivis-aktivis sosial untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas.

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

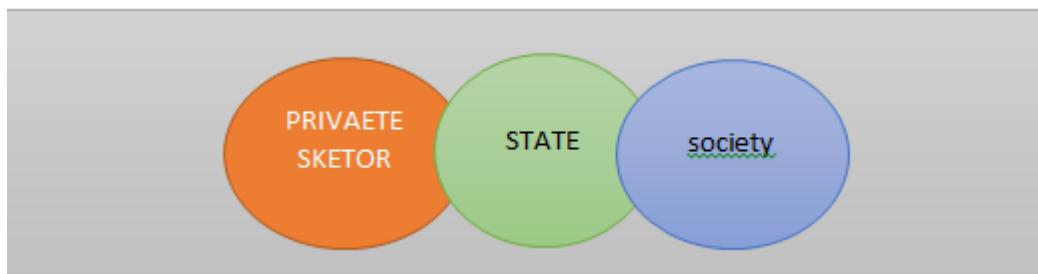
Semua kegiatan pengembangan masyarakat di arahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Perwujudan governance pada warga masyarakat (civil Society) dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan agen atau pelaku dari pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakatnya baik secara individu maupun dalam kelompok dalam sebuah kelembagaanya. Kelompok-kelompok sosial dapat terbentuk dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkumpul dalam memajukan tujuan dari kepentingan kelompok yang telah di bangun.

Peran individu dan kelompok dalam membentuk organisasi sosial pada gilirannya akan membantu dalam pencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan data yang ada , bahwa kelompok-kelompok sosial dikecamatan binawidya telah berkembang berdasarkan kebutuhan produk kelompoknya masing-masing. Aktivitas dari kelompok-kelompok berbentuk kelompok petani dan perkebunan, perikanan, pedagang, kerajinan, dan berbagai kelompok sosial lainnya. Namun kelompok-kelompok yang ada dewasa ini kurang mendapatkan pembinaan dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan.

Berdasarkan persoalan di atas, bahwa perwujudan good governance pada warga masyarakat telah terbentuk berdasarkan tujuan dari kelompok, namun keberadaan sumber daya kelompok belum mendapat pembinaan atau pemberdayaan dari pemerintah maupun dari perusahaan melalui program CSR yang belum terealisasi ketengah-ketenga masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa instansi governance dapat terwujudnya dengan baik dengan adanya kaloboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu institusi governance memiliki tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sektor (sektor swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat) perlu berkaloborasi dan berinterkasi dalam memenuhi kebutuhan publik. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan

hukum yang konduksif, private sektor menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan mengajak keompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan politik. Berikut digambarkan hubungan antar sktor pemerintah, swasta dan masyarakat

Gambar 2. hubungan antar sector



Sumber : Penulis, 2022

Negara, sebagai satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan yang bergerak diberbagai sektor informal dan pasar, sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinterkasi sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal .

Dalam mewujudkan *good governance* terdapat 3 permasalahan yang masih jauh dari kenyataan yaitu :

- (pertama). belum adanya sistem akuntansi sistem pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akutansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendaalian intern (internal kontrol) pemerintahan Daerah. Hal ini dialami oleh seluruh Pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem administrasinya tidak memadai maka sudah barang tentu sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang handal.
- (kedua), sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan ini. Disisi lain sangat sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang tetarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintah Daerah, karena komfensasi yang rendah yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (ketiga) belu adanya standar akuntansi keuangan sektor publik baku. Standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan pelaporan keuangan dan sebagai sala satu mekanisme pengendalian

4. KESIMPULAN

Governance terletak pada tiga domain yaitu State (negara atau Pemerintah), private sektor (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinterkasi dan menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang konduksif, private

sektor menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan mengajak kelompok dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Pemerintah kecamatan binawidya merupakan unsur pemerintahan kota Pekanbaru perlu melakukan kalaborasi atau membangun kemitraan baik kepada private sektor maupun kepada masyarakat (society). ketiga instansi governance tersebut sangat berperan menjalankan fungsinya masing-masing dan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya perwujudan good governance pada pasca pemekaran kecamatan binawidya belum dapat terwujud dengan baik, dimana pemerintah menjalin hubungan dengan swasta terutama dalam pemamfaaran proram CSR yang dimiliki perusahaan atau dunia usaha untuk diterapkan kepada lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas kelompok dan masyarakat yang masih rendah, diperlukan pembinaan kontinu dari pemerintah dan juga adanya kepedulian perusahaan dalam memberdayakan masyarakat.

5. SARAN

Perwujudan good governance pada sektor pemerintah terutama dalam penyelenggaran pelayanan publik masih rendah dan jauh dari kenyataan yang ada disebabkan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan publik kurang profesional, sehingga sistem pencatan dan pelaporan akuntansi pemerintah kurang handal lemahnya pengendalian internal Pemerintah. Untuk itu semangat good governance tidak hanya berlangsung pada lembaga pemerintah, tetapi juga digunakan oleh dunia usaha dan kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga bila hal ini terwujud akan mempermudah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andik wahyuni, 2013, Pemekaran wilayah dan otonomi Daerah pasca reformasi diIndonesia:konsep fakta empiris dan rekomendasi depan, Jurnal. Konstitusi .mksi.id
- [2] Adam indrawijaya,1983, Perubahan dan pengembangan organisasi, sinar baru Bandung
- [3] Bayu Kahrisma,2014, Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta : suatu pendekatan ekonomi kelembagaan, Jurnal buletin studi ekonomi,Vol 19.no.1 pebruari 2014.
- [3] Deli Mustafa, 2014, Biorkrasi Pemerintahan, Alapabeta Bandung
- [4] Dicky Wisnu UR, 2005 ,Teori Organisasi (struktur dan desain),UMM malang
- [5] Firda maulidathul Rizqiyah, 2021, Penambahan kecamatan perspektif UU No 23 tahun 2014 pasal 35 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah dan konsep mashlahah, al-bald : journal of constitutional law, vol 3 no 1 2021.
- [6] Fadhila dian maulida, evaluasi tingkat pelayanan publik pasca pemekaran wilayah kecamatan Sragi- kecamatan swalayan Kabupaten Pekalongan,jurnal.unnes,geo image 3 (2) (2014)

- [7] Gibson,ivancevich,donelly,2018,Organisasi (prilkau, struktur, proses), Bina aksara publisher, Jakarta
- [8] Rosaria Nikasar,2017, Dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan public : Studi kasus pada Pemekaran kecamatan krangan Koto Mojokerto, Repository.unair.ac.id
- [9] Malik cahyadin 2006, Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia, ekonomi journal of merging market (EJEM).
- [10] Michael,E.McGill,1993, Pedoman Pengembangan organisasi,PPM Pustama Binaman Presindo, Jakarta.
- [11] Nur Nasution, 2016, Manajemen perubahan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- [12] Neneng sri maryam, mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, jurnaal ilmu politik dan komunikasi, volue VI.No.1/juni 2016
- [13] Wibowo,2007, Manajemen Perubahan, Raja Grafindo Jakarta.
- [14] Peraturan Daerah Kota pekanbaru No.02 tahun 2020 tentang Pembentukan kecamatan Kota Pekanbaru.